

Cepu, 20 Maret 2018
No. 113/EP3800/2018-S0

Kepada : Direktur
PT. METRINDO Fax/Email : 0231-209641

Dari : Asset 4 General Manager Fax : 0296 – 421630

Perihal : **Penunjukan Pemenang Tender Jml Hal : 1 Lembar
Sewa 14 Unit Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) Berikut Tenaga Kerja
Pengoperasiannya di Asset 4 PT. Pertamina EP Field Poleng
Collective Number : EPN1-S18PL0003A-P25**

Sehubungan dengan proses tender untuk pekerjaan :

SEWA 14 UNIT KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERIKUT TENAGA KERJA PENGOPERASIANNYA DI LINGKUNGAN WILAYAH KERJA ASSET 4 PT PERTAMINA EP FIELD POLENG JANGKA WAKTU 36 BULAN

Mengacu pada hasil evaluasi Panitia Tender serta Penetapan Pemenang, Panitia Tender memutuskan dan menunjuk sebagai pemenang pengadaan pekerjaan tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. METRINDO
NPWP : 01.148.312.0-426.000
Harga Penawaran : Rp. 13.071.644.577,00 (Tidak Termasuk PPn)
Setelah Negosiasi
Terbilang : Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah
TKDN : 100,00 %
Jangka Waktu : Jangka Waktu perjanjian selama 1145 (Seribu Seratus Empat Puluh Lima) Hari Kalender meliputi :
- Jangka Waktu Pelaksanaan : 1095 (Seribu Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender
- Jangka Waktu Penyelesaian Administrasi : 50 (Lima Puluh) Hari Kalender

Kepada Saudara diwajibkan untuk membuat Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan tersebut di atas dengan PO No. 3900442416 paling lambat tanggal 02 April 2018 dengan jangka waktu Jaminan Pelaksanaan selama 1215 (Seribu Dua Ratus Lima Belas) hari kalender. Berlakunya Jaminan Pelaksanaan terhitung mulai dari tanggal terbitnya Jaminan Pelaksanaan.

Jaminan Pelaksanaan harus diserahkan kepada PT Pertamina EP sebelum penandatanganan Perjanjian (PO) atau SP3MP dan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Saudara harus memberikan jawaban secara tertulis yang menyatakan kesanggupan Saudara untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat ini.

Apabila Saudara mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang tender atau tidak memberikan jawaban atau tidak memberi kepastian bersedia untuk ditunjuk sebagai pemenang tender dalam batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal surat Penunjukan Pemenang Tender ini, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harap menghubungi Poleng Field Manager untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan Asset 4 SCM Manager untuk pembuatan PERJANJIAN.


Asset 4 General Manager

Agus Amperianto



PERJANJIAN

**SEWA 14 UNIT KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERIKUT TENAGA KERJA
PENGOPERASIANNYA DI LINGKUNGAN WILAYAH KERJA ASSET 4 PT PERTAMINA EP FIELD
POLENG JANGKA WAKTU 36 BULAN**

No. 3900442416

ANTARA

PT PERTAMINA EP

DENGAN

PT METRINDO

DI PT PERTAMINA EP ASSET 4

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| A | 9 | 1 |

PERJANJIAN

**SEWA 14 UNIT KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERIKUT TENAGA KERJA
PENGOPERASIANNYA DI LINGKUNGAN WILAYAH KERJA ASSET 4 PT PERTAMINA EP FIELD
POLENG JANGKA WAKTU 36 BULAN**

No. 3900442416

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh dan antara :

1. **PT Pertamina EP**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 31 Tanggal 18 April 2016, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009150.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 15 Mei 2016 yang beralamat di Gedung Menara Standard Chartered Lantai 21, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12950, NPWP No. 02.369.005.0-081.000, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Amperianto** selaku **Asset 4 General Manager**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT METRINDO** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 21 April 2004, dibuat di hadapan Drs. Ari Sandi Irawan, SH., Notaris di Kabupaten Cirebon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-12876 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 40 Tanggal 27 September 2013, dibuat di hadapan Drs. Ari Sandi Irawan, SH., Notaris di Kabupaten Cirebon yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-42822 tanggal 18 Oktober 2013, yang beralamat Jl. Yos Sudarso No. 19 Cirebon, NPWP No. 01.148.312.0-431.000, dalam hal ini diwakili oleh **Nina Aryani** selaku **Direktur**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK**" atau secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** menghendaki "**SEWA 14 UNIT KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERIKUT TENAGA KERJA PENGOPERASIANNYA DI LINGKUNGAN WILAYAH KERJA ASSET 4 PT PERTAMINA EP FIELD POLENG JANGKA WAKTU 36 BULAN**", sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Lelang No. EPN3-S17PL0008A-P25 untuk selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PEKERJAAN**".
- Bahwa **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Penawaran Teknis dan Harga No. 110/M-SPH/II-2018 tanggal 21 Februari 2018 dan Surat Penawaran Hasil Negosiasi No. 115C/M-SPH/III-2018 tanggal 06 Maret 2018 menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** sesuai Surat Penunjukan Pemenang No. 113/EP3800/2018-S0 tanggal 20 Maret 2018 telah menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana **PEKERJAAN** tersebut.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| A | B | C |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan **PEKERJAAN** (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD PERJANJIAN

Maksud **PERJANJIAN** ini adalah untuk mendukung kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA** yaitu dengan terlaksananya **PEKERJAAN** sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Ruang Lingkup **PEKERJAAN** dan spesifikasi yang terlampir pada Lampiran A **PERJANJIAN** ini.

PASAL 2

DEFINISI DAN DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN

- 2.1. Istilah-istilah dan/atau singkatan-singkatan yang digunakan dalam **PERJANJIAN** ini dan/atau dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan **PERJANJIAN** ini wajib ditafsirkan maksud dan artinya sebagai berikut:
- a. **PERJANJIAN** adalah kesepakatan tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, mengenai "SEWA 14 UNIT KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERIKUT TENAGA KERJA PENGOPERASIANNYA DI LINGKUNGAN WILAYAH KERJA ASSET 4 PT PERTAMINA EP FIELD POLENG JANGKA WAKTU 36 BULAN", yang mengikat **PARA PIHAK** dan memiliki akibat hukum serta tunduk kepada ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia, didalamnya termasuk lampiran-lampiran sebagaimana diuraikan pada Pasal 2.2 **PERJANJIAN**.
 - b. **DOKUMEN ASURANSI** adalah Polis(-polis) asuransi dan/atau sertifikat asuransi atau Nota penutupan asuransi yang menyatakan asuransi yang ditutup oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.
 - c. **INSTRUKSI TERTULIS** adalah Surat Perintah Kerja, Work Order atau Berita Acara Mulai Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini termasuk juga SP3MP yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **LOKASI PEKERJAAN** adalah tempat dilaksanakannya **PEKERJAAN**.
 - e. **KEADAAN KAHAR** adalah suatu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa atau kendali **PARA PIHAK** dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan seluruh atau sebagian kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** dari **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar. **KEADAAN KAHAR** termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam/Act of God (antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, badai, angin topan, gunung meletus, tanah longsor atau wabah penyakit), peperangan, kerusuhan, sabotase, revolusi, kebakaran, peraturan perundang-undangan/keputusan Tata Usaha Negara yang baru diterbitkan dan berakibat pada tidak dapat dilanjutkannya perjanjian dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana diyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
 - f. **KELALAIAN** adalah tindakan yang bertentangan atau kegagalan untuk mematuhi sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** dan peraturan perundang-undangan serta Keputusan PengadilanTata Usaha Negara yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan kaidah, program, maupun standar yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi (*best oilfield practices*), serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| 3 | 9 | 1 |

dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*) yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

- g. PERSONIL PIHAK PERTAMA adalah orang yang dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan PEKERJAAN.
- h. PERSONIL PIHAK KEDUA adalah orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan PEKERJAAN.
- i. PIHAK KETIGA adalah semua pihak yang bukan bagian dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA.
- j. Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi ("SKK MIGAS") adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.

2.2 Lampiran-lampiran dibawah ini merupakan bagian integral dari PERJANJIAN, yaitu:

Lampiran A : Lingkup PEKERJAAN

Lampiran B : Ketentuan Pembayaran, Pajak, Jaminan Pelaksanaan dan Asuransi

Lampiran C : Sanksi dan Denda

Lampiran D : Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Lampiran E : Ketentuan Aspek HSE

Lampiran F : Format Surat Standar

Lampiran G : Lain-lain

Lampiran-lampiran PERJANJIAN ini dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam hal terdapat perbedaan isi di dalam dokumen elektronik ini, maka yang berlaku adalah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

2.3 PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan-kesepakatan dan persetujuan-persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini.

2.4 Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan di dalam PERJANJIAN ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 Jangka waktu PERJANJIAN adalah jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN ditambah periode pengenaan denda keterlambatan penyelesaian PEKERJAAN hingga mencapai maksimal, termasuk dalam hal ini meliputi periode lainnya (bila ada) sebagaimana diatur dalam Lampiran A, kecuali terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. disepakati PARA PIHAK untuk diakhiri lebih awal; atau
- b. diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 9 PERJANJIAN

3.2 PERJANJIAN ini berlaku efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan) sebagaimana diatur pada Pasal 11 PERJANJIAN.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

- 3.3 PIHAK KEDUA dilarang memulai pelaksanaan PEKERJAAN sampai dengan PIHAK PERTAMA menyampaikan INSTRUKSI TERTULIS. Jika PIHAK KEDUA melaksanakan PEKERJAAN sebelum tanggal yang ditentukan dalam INSTRUKSI TERTULIS atau melaksanakan PEKERJAAN tanpa adanya INSTRUKSI TERTULIS, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan PEKERJAAN tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yaitu maksimal sebesar Nilai PERJANJIAN sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 PERJANJIAN.

PASAL 4

PENGALIHAN PERJANJIAN DAN PEKERJAAN

- 4.1. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan PERJANJIAN kepada PIHAK KETIGA.
- 4.2. Dalam melaksanakan PEKERJAAN sesuai PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan kepada PIHAK KETIGA berupa:
- a. PEKERJAAN utama,
 - b. Lebih dari 50% dari nilai jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya,
 - c. Penyediaan barang atau peralatan dalam perjanjian pengadaan barang, atau
 - d. Perjanjian jasa Tenaga Kerja
- 4.3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan PEKERJAAN di luar PEKERJAAN utama baik sebagian atau seluruhnya kepada subkontraktor, sebagaimana diuraikan pada Lampiran A, kecuali dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 4.4. Apabila terjadi pengalihan PEKERJAAN sesuai dengan Pasal 4.3 di atas, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas kualitas PEKERJAAN yang dilaksanakan oleh subkontraktornya, sehingga tidak menyebabkan terhambatnya penyelesaian PEKERJAAN sesuai ketentuan PERJANJIAN ini, dan PIHAK KEDUA membebaskan serta mengganti rugi PIHAK PERTAMA atas segala tuntutan, klaim dan/atau gugatan ganti kerugian dari subkontraktor PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
- 4.5. Apabila terjadi pengalihan PEKERJAAN sesuai dengan Pasal 4.3 di atas, PIHAK KEDUA menjamin bahwa PEKERJAAN yang dialihkan kepada subkontraktor tidak disubkontrakan lagi kepada pihak lain.

PASAL 5

NILAI PERJANJIAN

Nilai PERJANJIAN ini adalah sebesar Rp. 13.071.644.577,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) (tidak termasuk PPN) sebagaimana dirinci dalam Lampiran B.

PASAL 6

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

- 6.1 PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin akan melaksanakan PEKERJAAN sesuai dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN dan peraturan perundang-undangan yang

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan kaidah, program, maupun standar yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi (*best oilfield practices*), serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*) yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

- 6.2 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah mengerti dan memahami kondisi **LOKASI PEKERJAAN** dan oleh karenanya telah mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** sehubungan dengan kondisi **LOKASI PEKERJAAN**.
- 6.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan peralatan untuk melaksanakan **PEKERJAAN**, maka **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa semua peralatan yang disediakan untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** telah memenuhi standar yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi (*best oilfield practices*) serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*) dan layak untuk digunakan serta dilengkapi dengan sertifikat yang sesuai dengan perijinannya.
- 6.4 Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut pengadaan barang dan/atau instalasi barang, **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa barang-barang yang diserahkan dan/atau telah terpasang oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya, dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala gugatan/klaim dari **PIHAK KETIGA** terhadap barang tersebut.
- 6.5 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa **PERSONIL PIHAK KEDUA** telah dilengkapi dengan sertifikat yang diperlukan yang merujuk pada lampiran A dan diberi pelatihan yang merujuk pada Lampiran E, serta pemahaman yang komprehensif sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** termasuk namun tidak terbatas terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*).
- 6.6 Dalam hal **PIHAK KEDUA** melibatkan subkontraktor dalam pelaksanaan **PEKERJAAN**, maka tanpa mengesampingkan ketentuan sanksi dan denda dalam Lampiran C **PERJANJIAN** ini, apabila **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang diperjanjikan sesuai **PERJANJIAN** kepada subkontraktor dan digugat oleh subkontraktor ke pengadilan atau arbitrase, **PIHAK KEDUA** dan pimpinan tertinggi perusahaan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Tender pada semua KKKS sampai seluruh kewajibannya kepada subkontraktor terkait terpenuhi.
- 6.7 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa akan melakukan kewajibannya terkait dengan pembayaran upah, tunjangan, santunan, atau pemenuhan seluruh hak-hak ketenagakerjaan lainnya kepada seluruh **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan **PEKERJAAN**, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala klaim dan gugatan yang terkait dengan **PERSONIL PIHAK KEDUA**.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- 6.8 **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan **PEKERJAAN** seperti yang diuraikan pada Lingkup **PEKERJAAN** yang tercantum dalam Lampiran A ini secara profesional, sesuai dengan praktik-praktek yang diterima secara umum.
- 6.9 **PIHAK KEDUA** wajib memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, ijin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** dari semua instansi Pemerintah, baik lokal, propinsi, maupun nasional.
- 6.10 **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama SKK Migas Nomor : PTK-007/SKKO0000/2015/S0 maupun perubahannya, bila ada.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

- 6.11 Atas perintah **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib bekerjasama dengan kontraktor-kontraktor **PIHAK PERTAMA** lainnya.
- 6.12 **PIHAK KEDUA** dilarang mengganggu dalam bentuk apapun terhadap semua kegiatan-kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA** dan/atau kontraktor-kontraktor **PIHAK PERTAMA** lainnya di **LOKASI PEKERJAAN**.
- 6.13 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, **PERSONIL PIHAK KEDUA**, dan fasilitasnya sendiri dan/atau yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** yang digunakan oleh maupun berada dalam penguasaan atau pengawasan **PIHAK KEDUA**.
- 6.14 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab serta membebaskan, melepaskan dan mengganti rugi **PIHAK PERTAMA** dari setiap klaim, tuntutan, gugatan, dari **PERSONIL PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 6.15 **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil-nya, serta semaksimal mungkin melakukan pencegahan agar dalam melakukan tugas dan kewajibannya **PERSONIL PIHAK KEDUA** tidak melakukan hal-hal yang :
- a. melanggar Ketertiban Umum;
 - b. melanggar hukum;
 - c. melanggar ketentuan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*); dan
 - d. melakukan hal/tindakan yang mengakibatkan hambatan/kendala operasi **PIHAK PERTAMA**.
- 6.16 Atas permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti personil-nya dalam hal :
- a. dinilai kurang mampu/kurang cakap dalam melaksanakan **PEKERJAAN**;
 - b. mangkir/tidak masuk kerja tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu; atau
 - c. melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 6.15 Butir a., b., c. dan d.
- PERSONIL PIHAK KEDUA** pengganti wajib sudah berada di **LOKASI PEKERJAAN** dan siap untuk melaksanakan **PEKERJAAN** dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- 6.17 **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi pembayaran kepada subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN**.
- 6.18 **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak sewa atau Kontrak konsinyasi.
- 6.19 **PIHAK KEDUA** wajib bekerja sama dengan usaha menengah dan/atau kecil setempat termasuk koperasi menengah dan/atau kecil setempat dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan sebagaimana diatur pada Lampiran A1.
- 6.20 **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran upah, tunjangan, santunan, atau seluruh hak-hak ketenagakerjaan lainnya kepada seluruh **PERSONIL PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** tanpa menggantungkan pembayaran tersebut dengan proses pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 6.21 **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** selama Jangka Waktu **PERJANJIAN**.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| A | B | C |

- 6.22 **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Lampiran A.
- 6.23 **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** untuk seluruh pelaksanaan **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan **PERJANJIAN** ini dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A dan Lampiran B, kecuali diterapkannya ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan pengesampingan kewajiban membayar **PIHAK PERTAMA** atas **KELALAIAN PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Lampiran C, bila ada.

PASAL 7

TATA CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pembayaran diatur secara rinci dalam Lampiran B.

PASAL 8

PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

- 8.1 **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab atas dan akan menanggung dan membayar setiap dan semua pajak serta pembebanan-pembebanan lain yang dikenakan atas, timbul dari atau yang berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** dan harta benda **PIHAK KEDUA** menurut **PERJANJIAN** ini, yang dipungut dan ditaksir pada setiap waktu, baik menurut undang-undang serta peraturan yang berlaku mulai tanggal berlakunya **PERJANJIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **PERJANJIAN** atau yang diundangkan sesudah itu oleh setiap yurisdiksi, instansi pemerintah.
- 8.2 Ketentuan mengenai pajak dan pungutan-pungutan lainnya secara rinci diatur dalam Lampiran B.

PASAL 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 9.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam **PERJANJIAN** ini.
- 9.2 **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis dalam periode sebagaimana disebutkan di Pasal 9.13 di bawah dalam hal terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut :
- a. Adanya ketentuan, instruksi, atau perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan **PERJANJIAN**, atau maksud tujuannya menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator untuk mengurus harta kekayaannya;
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan pengalihan **PERJANJIAN** atau **PEKERJAAN** utama kepada **PIHAK KETIGA**;
 - d. **PEKERJAAN** yang telah dialihkan **PIHAK KEDUA** ke subkontraktor dialihkan lagi oleh subkontraktor tersebut kepada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.5 **PERJANJIAN**.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

- e. PIHAK PERTAMA telah menyampaikan Surat Pemberitahuan **KELALAIAN**, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran F kepada PIHAK KEDUA sebanyak minimal 1 (satu) kali namun PIHAK KEDUA tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki setiap **KELALAIAN** dalam waktu yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau tidak mencapai kemajuan seperti yang diminta dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan **KELALAIAN**;
 - f. Apabila terdapat keterangan resmi dari instansi terkait yang berwenang yang menyatakan bahwa terdapat dokumen, keterangan atau rekomendasi termasuk namun tidak terbatas pada Jaminan Pelaksanaan, sertifikat atau keterangan perizinan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah tidak benar atau palsu, dan adanya proses penyelidikan dan/atau penyidikan oleh pihak yang berwenang terhadap PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang berhubungan dengan PIHAK KEDUA namun melibatkan PIHAK PERTAMA;
 - g. Jumlah denda telah mencapai maksimum sebagaimana diatur dalam Lampiran C; atau
 - h. Terjadi kecelakaan fatal (*fatality accident*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan/atau kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen atau hilangnya anggota tubuh seseorang yang disebabkan oleh **KELALAIAN PIHAK KEDUA**.
- 9.3 Apabila PIHAK KEDUA tidak memulai pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari kalender sejak tanggal ditentukan dalam **PERJANJIAN** atau sebagaimana ditentukan dalam **INSTRUKSI TERTULIS**, PIHAK PERTAMA berhak memutus **PERJANJIAN** secara sepihak.
- 9.4 Pemutusan **PERJANJIAN** berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 **PERJANJIAN**. Apabila tanggal tidak ditentukan, pemutusan **PERJANJIAN** berlaku sejak surat pemberitahuan tertulis dimaksud diterima oleh PIHAK KEDUA.
- 9.5 Pemutusan **PERJANJIAN** karena sebab apapun tidak menghalangi PIHAK PERTAMA untuk menuntut haknya atau menuntut perbaikan lainnya kepada PIHAK KEDUA sesuai **PERJANJIAN** ini.
- 9.6 Dalam hal terjadi pemutusan **PERJANJIAN** yang disebabkan karena ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan ketentuan **PERJANJIAN** (sesuai Pasal 9.2 butir b, c, d, e, f, g dan 9.3 **PERJANJIAN**), denda terhadap PIHAK KEDUA, jika ada, wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan jaminan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 11 **PERJANJIAN**, akan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA ganti rugi apapun kecuali terhadap biaya-biaya menurut syarat-syarat **PERJANJIAN** untuk bagian dari **PEKERJAAN** yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan bukti – bukti resmi, kecuali biaya Demobilisasi, bila ada.
- 9.7 Dalam hal terjadi pemutusan **PERJANJIAN** sesuai Pasal 9.2 butir b **PERJANJIAN**, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kreditur Preferen yang berhak menerima pembayaran terlebih dahulu atas sejumlah nilai yang merupakan hak PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN**.
- 9.8 PIHAK KEDUA wajib melanjutkan **PEKERJAAN** seperti yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA sebelum tanggal efektif berlakunya pemutusan. PIHAK KEDUA wajib tetap mengikuti perintah-perintah PIHAK PERTAMA untuk terlaksananya penghentian **PEKERJAAN** secara tertib sampai tanggal efektif mulai berlakunya pemutusan.
- 9.9 Dalam hal terjadi pemutusan **PERJANJIAN**, semua buku harian, data, rencana, spesifikasi, laporan, perkiraan, ringkasan **PEKERJAAN** yang diselesaikan dan **PEKERJAAN** yang sedang berjalan, dan keterangan serta dokumentasi lainnya yang telah dihimpun oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini wajib diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan menjadi milik

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal efektif pemutusan **PERJANJIAN**.

- 9.10 Dalam hal terjadi pemutusan **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud Pasal 9 **PERJANJIAN** ini atau berakhirnya **PERJANJIAN**, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan demobilisasi dalam waktu yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** atau sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2 **PERJANJIAN**. Apabila tenggat waktu demobilisasi tidak ditentukan, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan demobilisasi selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal berakhirnya **PERJANJIAN** atau tanggal efektif pemutusan **PERJANJIAN**.
- 9.11 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan demobilisasi sebagaimana diatur pada Pasal 9.10 **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Memindahkan/mengeluarkan peralatan dan/atau material **PIHAK KEDUA** dari **LOKASI PEKERJAAN** atau wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - Menahan pembayaran terhadap tagihan dan memperhitungkannya terhadap biaya yang timbul atas pelaksanaan butir a; dan/atau
 - Mencairkan jaminan pelaksanaan **PIHAK KEDUA**.
- 9.12 Atas pelaksanaan Pasal 9.11 butir a **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan dan/atau kehilangan peralatan dan/atau material **PIHAK KEDUA** tersebut.
- 9.13 **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangannya sendiri yang didasarkan pada kondisi di luar kuasa **PIHAK PERTAMA** yang tidak termasuk dalam kategori **KEADAAN KAHAR** yang dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam **PERJANJIAN**, berhak untuk setiap waktu secara sepahak memutuskan **PERJANJIAN** ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 30 (tiga puluh) **HARI KALENDER** sebelum tanggal putusnya **PERJANJIAN**. Jika **PERJANJIAN** diputus secara sepahak seperti diatur dalam Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dapat menagih (dari **PIHAK PERTAMA**) dan **PIHAK PERTAMA** akan membayar (kepada **PIHAK KEDUA**) hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan dan/atau **MATERIAL** yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal putusnya **PERJANJIAN** ini. Jika **PERJANJIAN** diputus berdasarkan Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

PERIZINAN

Seluruh perizinan yang diperlukan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** wajib diurus dan diselesaikan atas beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan apabila diperlukan dengan bantuan korespondensi dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

JAMINAN PELAKSANAAN

- 11.1 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** jaminan pelaksanaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran B.
- 11.2 **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan jaminan pelaksanaan apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau karena pemutusan **PERJANJIAN** sebagaimana diatur pada Pasal 9 **PERJANJIAN**.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

PASAL 12

IMPOR

Apabila dalam pelaksanaan **PEKERJAAN PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas impor **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib tunduk kepada pengaturan mengenai ekspor-impor yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13

SANKSI DAN DENDA

- 13.1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan **KELALAIAN** dalam memenuhi ketentuan **PERJANJIAN** baik sebagian atau seluruhnya, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi dan/atau denda kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran C.
- 13.2. Terhadap setiap ketentuan mengenai sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Lampiran C, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi dan denda tersebut kepada **PIHAK KEDUA** secara bersamaan atau secara terpisah.
- 13.3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang diperjanjikan kepada subkontraktor dan digugat oleh subkontraktor ke pengadilan atau arbitrase, **PIHAK KEDUA** dan pimpinan tertinggi perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Tender pada semua KKKS sampai seluruh kewajibannya kepada subkontraktor terkait dipenuhi.

PASAL 14

A S U R A N S I

PIHAK KEDUA selama masa berlakunya **PERJANJIAN** ini, atas biaya sendiri, wajib menutup asuransi, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B, dengan para Asuradur yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

- 15.1 **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan karena **KELALAIAN PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **KEADAAN KAHAR**, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut.
- 15.2 **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) yang diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran F, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah yang layak agar memungkinkan **PIHAK** tersebut melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **PERJANJIAN** disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dan/atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi **KEADAAN KAHAR** tersebut.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | KEDUA |
| ✓ | ✓ | ✗ |

PASAL 12

IMPOR

Apabila dalam pelaksanaan PEKERJAAN PIHAK KEDUA menggunakan fasilitas impor PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada pengaturan mengenai ekspor-impor yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

SANKSI DAN DENDA

- 13.1. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan KELALAIAN dalam memenuhi ketentuan PERJANJIAN baik sebagian atau seluruhnya, PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran C.
- 13.2. Terhadap setiap ketentuan mengenai sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Lampiran C, PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan denda tersebut kepada PIHAK KEDUA secara bersamaan atau secara terpisah.
- 13.3. Dalam hal PIHAK KEDUA lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang diperjanjikan kepada subkontraktor dan digugat oleh subkontraktor ke pengadilan atau arbitrase, PIHAK KEDUA dan pimpinan tertinggi perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti Tender pada semua KKKS sampai seluruh kewajibannya kepada subkontraktor terkait dipenuhi.

PASAL 14

A S U R A N S I

PIHAK KEDUA selama masa berlakunya PERJANJIAN ini, atas biaya sendiri, wajib menutup asuransi, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B, dengan para Asuradur yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

- 15.1 PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan karena KELALAIAN PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut KEADAAN KAHAR, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut.
- 15.2 PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR harus segera memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) yang diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran F, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah yang layak agar memungkinkan PIHAK tersebut melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai PERJANJIAN disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dan/atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi KEADAAN KAHAR tersebut.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

- 15.3 Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tidak ada pemberitahuan sesuai dengan Pasal 15.2 **PERJANJIAN**, **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.
- 15.4 **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.2 **PERJANJIAN**. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang diberitahu, **PIHAK** yang diberitahu dianggap telah menyetujui terjadinya **KEADAAN KAHAR**.
- 15.5 Apabila **KEADAAN KAHAR** ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini. Apabila **KEADAAN KAHAR** tersebut disetujui oleh **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan **PERJANJIAN**, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal pelaksanaan **PERJANJIAN** serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** ini selanjutnya.
- 15.6 Penolakan **KEADAAN KAHAR** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.4 dan 15.5 dapat dilakukan sepanjang **PIHAK** yang menolak dapat membuktikan bahwa terdapat opsi lain yang dapat dilakukan sehingga kondisi yang dinyatakan sebagai **KEADAAN KAHAR** dapat diantisipasi dan tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN**.
- 15.7 Apabila **PIHAK** dalam **PERJANJIAN** ini gagal dan/atau terlambat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini akibat **KEADAAN KAHAR**, kegagalan atau keterlambatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu **KELALAIAN**, dan **PIHAK** tersebut dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya selama **KEADAAN KAHAR** tersebut, selama terdapat hubungan langsung antara kegagalan dan/atau keterlambatan tersebut dan terjadinya **KEADAAN KAHAR**.
- 15.8 Apabila **KEADAAN KAHAR** berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri/memutuskan **PERJANJIAN**.

PASAL 16

PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 16.1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 16 **PERJANJIAN** ini tetap berlaku setelah habisnya jangka waktu **PERJANJIAN** atau terjadinya pemutusan **PERJANJIAN**.
- 16.2. Khusus berlaku untuk Pasal 16 **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** berarti termasuk anak perusahaannya, para mitra usahanya, para kontraktornya, para subkontraktornya, para pekerjanya, pegawainya, direkturnya, dan para agennya dan **PIHAK KEDUA** berarti termasuk afiliasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, para mitra usahanya, para kontraktornya, para subkontraktornya, para pekerjanya, pegawainya, direkturnya, dan para agennya.
- 16.3. Masing-masing **PIHAK** wajib bertanggung jawab serta mengganti rugi **PIHAK** yang menderita kerugian atau **PIHAK KETIGA** atas setiap jenis kerugian yang disebabkan oleh **KELALAIAN**-nya.
- 16.4. **PERSONIL PIHAK KEDUA**

Semua pegawai dan personil yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** wajib melindungi, mengganti rugi dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap segala klaim, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya hukum) dari setiap jenis dan serta sifat cedera atau kematian pegawai dan personil yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA** dan untuk semua kerusakan atau kehilangan atau kehancuran harta

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

benda pegawai dan personil yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KELALAIAN PIHAK PERTAMA**.

16.5. PERSONIL PIHAK PERTAMA

Semua pegawai dan personil yang dipekerjakan **PIHAK PERTAMA** merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** wajib melindungi, mengganti rugi dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari dan terhadap segala klaim, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya hukum) dari setiap jenis dan serta sifat cedera atau kematian pegawai dan personil yang dipekerjakan **PIHAK PERTAMA** dan untuk semua kerusakan atau kehilangan atau kehancuran harta benda pegawai dan personil yang dipekerjakan **PIHAK PERTAMA** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KELALAIAN PIHAK KEDUA**.

16.6. HARTA BENDA PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab pada setiap waktu, termasuk pada saat transit, atas kehilangan, terhadap segala kerusakan atau kehancuran harta benda **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib melindungi, mengganti rugi, membela dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap segala klaim, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan-gugatan serta setiap jenis putusan (termasuk biaya hukum) untuk kerusakan, kehilangan atau kehancuran harta benda **PIHAK KEDUA** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KELALAIAN PIHAK PERTAMA** atau harta benda **PIHAK KEDUA** berada dalam penguasaan atau sedang digunakan **PIHAK PERTAMA**.

16.7. HARTA BENDA PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab pada setiap waktu, termasuk pada saat transit, atas kehilangan, terhadap segala kerusakan atau kehancuran harta benda **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib melindungi, mengganti rugi, membela dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari dan terhadap segala klaim, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan-gugatan serta setiap jenis putusan (termasuk biaya hukum) untuk kerusakan, kehilangan atau kehancuran harta benda **PIHAK PERTAMA** kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh **KELALAIAN PIHAK KEDUA** atau harta benda **PIHAK PERTAMA** berada dalam penguasaan atau sedang digunakan **PIHAK KEDUA**.

16.8. KLAIM-KLAIM PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA wajib melindungi, mengganti rugi, membela dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap seluruh klaim, tanggung jawab, permintaan-permintaan, akibat tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan (termasuk ongkos-ongkos dan biaya-biaya konsultan hukum) untuk setiap jenis (i) luka-luka atau kematian dari seluruh **PIHAK KETIGA** selain yang dimaksud dalam Pasal 16.2 **PERJANJIAN**, dan (ii) kehilangan atau kerusakan Harta Benda **PIHAK KETIGA** (selain harta benda yang dimiliki Sub-kontraktor **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud dalam Pasal 16.2 **PERJANJIAN**) yang timbul atau disebabkan sebagai bagian dari pelaksanaan **PEKERJAAN** oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali oleh hal-hal yang disebabkan oleh **KELALAIAN PIHAK PERTAMA**.

16.9. KLAIM SUB-KONTRAKTOR DAN PERSONIL PIHAK KEDUA

- Seluruh klaim kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perburuan (termasuk namun tidak terbatas pada jaminan sosial, pembayaran akibat pengakhiran atau manfaat-manfaat serupa), jasa-jasa, perlengkapan, alat-alat dan barang-barang lain yang dipersyaratkan atau digunakan oleh **PIHAK KEDUA** wajib dibayar dengan tepat waktu dan **PIHAK KEDUA** wajib melindungi, mengganti rugi, membela dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap seluruh pertanggungjawaban, tuntutan-tuntutan dan pengeluaran-pengeluaran atas seluruh klaim-klaim tersebut.
- Bila diminta oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti tertulis yang cukup bagi **PIHAK PERTAMA**, bahwa tidak ada tagihan yang belum dibayar untuk sesuatu bagian dari **PEKERJAAN** yang dilakukan atau material yang disediakan menurut **PERJANJIAN** ini yang

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

menurut pendapat **PIHAK PERTAMA** dapat merupakan dasar untuk suatu tuntutan oleh personil, para pemasok atau para subkontraktor **PIHAK KEDUA** dari/atau suatu jaminan, gadai, tagihan atau pembebasan terhadap milik yang tersangkut. **PIHAK PERTAMA** berhak menahan pembayaran sampai **PIHAK KEDUA** memberi bukti tersebut.

- c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bisa memberikan bukti tertulis serta tidak melakukan atau lalai membayar untuk membebaskan suatu jaminan, gadai atau tuntutan tersebut yang dimaksud Pasal 16.9 butir b **PERJANJIAN** dalam jangka waktu yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA**, tanpa mengurangi hak lainnya yang mungkin dimiliki **PIHAK PERTAMA** menurut **PERJANJIAN** atau hukum, berhak membebaskan gadai atau tuntutan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** wajib memberikan penggantian kepada **PIHAK PERTAMA** atas semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk membebaskan gadai atau tuntutan tersebut termasuk biaya hukum dan administratif. **PIHAK PERTAMA** berhak memotong jumlah dari ongkos dan biaya-biaya tersebut dari tiap pembayaran pada **PIHAK KEDUA**.

16.10. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab, dan melindungi, mengganti rugi, membela dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap sesuatu dan segala tuntutan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul akibat **KELALAIAN PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan tunduk kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16.11. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** atas segala kerugian yang timbul akibat **KELALAIAN PIHAK PERTAMA** berdasarkan Pasal 16.4 dan Pasal 16.6 **PERJANJIAN** adalah maksimal sebesar nilai **PERJANJIAN**.

16.12. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas segala kerugian yang timbul akibat **KELALAIAN PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 16.5 dan Pasal 16.7 **PERJANJIAN** adalah maksimal sebesar nilai **PERJANJIAN**.

PASAL 17

PIHAK KEDUA SEBAGAI KONTRAKTOR MANDIRI

PIHAK KEDUA merupakan kontraktor mandiri, dan para pegawainya atau agennya bukanlah pembantu, agen atau pegawai **PIHAK PERTAMA**. Pelaksanaan **PEKERJAAN** yang sesungguhnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** di bawah pengawasan dan petunjuk **PIHAK PERTAMA** tidak mengurangi kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** menurut **PERJANJIAN** ini. **PIHAK KEDUA** wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk mengakomodasi dan melaksanakan saran-saran dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 18

KERAHASIAAN

- 18.1. Semua keterangan dan data yang diperoleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** merupakan rahasia dan milik eksklusif **PIHAK PERTAMA** semata-mata. **PIHAK KEDUA** beserta personil, mitra, afiliasi dan subkontraktornya wajib menjaga kerahasiaan data dimaksud. Sifat kerahasiaan ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun telah berakhirmya **PERJANJIAN** kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** beserta personil, mitra, afiliasi dan subkontraktornya atas ketentuan ini dapat dituntut oleh **PIHAK PERTAMA**.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

- 18.2. Syarat-syarat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PERJANJIAN ini tidak berlaku untuk :
- Informasi yang telah atau menjadi, tanpa **KELALAIAN PIHAK KEDUA** atau para karyawan, perwakilan, pemasok atau subkontraktornya, bagian dari hal yang diketahui oleh umum;
 - Informasi yang secara sah dan menurut hukum tersedia untuk **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KETIGA**, sepanjang informasi demikian telah diterima tanpa kewajiban untuk merahasiakannya atau pembatasan dalam penggunaannya dari **PIHAK KETIGA** tersebut; atau
 - Informasi yang telah berada dalam kepemilikan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan dalam penggunaan atau pengungkapannya.

PASAL 19

PATEN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 19.1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dan wajib membela, memberi ganti rugi serta membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari dan terhadap semua gugatan, instruksi dan proses pengadilan yang timbul dari suatu gugatan pelanggaran terhadap segala bentuk hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional termasuk namun tidak terbatas pada paten proses, paten produk, permohonan paten, desain industri, desain sirkuit terpadu, merek atau hak milik perindustrian yang dipertahankan haknya oleh **PIHAK KETIGA** mengenai suatu alat, atau metoda yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan **PEKERJAAN**. Apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dengan barang atau metoda yang tidak melanggar hak-hak milik tersebut yang secara substansial mempunyai fungsi yang sama untuk melaksanakan **PEKERJAAN** sesuai ketentuan PERJANJIAN ini, tanpa biaya tambahan bagi **PIHAK PERTAMA**.
- 19.2. Dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul selama jangka waktu berlakunya PERJANJIAN, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam PERJANJIAN ini, **PERSONIL PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** kemungkinan berhasil membuat ciptaan, gagasan atau penemuan yang baru yang dapat dilindungi sebagai hak paten atau hak cipta (selanjutnya disebut sebagai "Kekayaan Intelektual"). Dalam hubungannya dengan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju memberlakukan ketentuan atas hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA** akan menjadi pemilik Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran atau dibuat semata-mata oleh **PERSONIL PIHAK PERTAMA** dalam PERJANJIAN ini.
 - PIHAK KEDUA** akan menjadi pemilik Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran atau dibuat semata-mata oleh **PERSONIL PIHAK KEDUA** dalam PERJANJIAN ini.
 - PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memiliki hak yang sama atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran bersama atau dibuat bersama-sama oleh **PERSONIL PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam PERJANJIAN ini.
 - Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat bahwa hak paten akan dicatatkan sebagai penemuan bersama, maka keduanya akan mengutamakan kejujuran dan setuju untuk pengajuan hak paten secara bersama.
 - Dalam hal **PARA PIHAK** tidak ingin berbagi sama rata dalam hal pembayaran biaya persiapan, pencatatan dan pelaksanaan atas kepemilikan hak paten secara bersama dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penemuan, pengakuan serta penetapan atas hak paten tersebut, maka **PIHAK** yang mengeluarkan seluruh biaya-biaya tersebut akan menjadi penentu dalam pengajuan hak paten atau turunannya, atau penerbitan hak paten apabila

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | ✓ |

ada, dan bagi **PIHAK** yang tidak bersedia mengeluarkan biaya tidak akan mendapatkan hak royalty dan bebas lisensi yang tidak dapat dibatalkan sehingga tidak berhak menjual atau menyewakan penemuan bersama tersebut kepada pihak lain.

- (3) **PARA PIHAK** setuju bekerja sama dalam penyiapan, pencatatan dan pelaksanaan yang berhubungan dengan peradilan dan administrasi dan wajib membayar biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan kepemilikan bersama atas hak paten secara bersama tersebut, akan tetapi salah satu **PIHAK** dapat memilih dan menyatakan kepada **PIHAK** lainnya bahwa **PIHAK** tersebut berkehendak untuk tidak melanjutkan pembayaran atas biaya tersebut dan sesudah itu segera menyerahkan hak paten tersebut kepada **PIHAK** lainnya dan melepaskan haknya untuk mendapatkan andil pada royalti dan bebas lisensi yang tidak dapat dibatalkan pada sisa masa berlakunya hak paten.
- 19.3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan atas semua pemikiran, gagasan dan penemuan yang dibuat oleh personil dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul, khususnya yang spesifik berhubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** dalam **PERJANJIAN** ini.
- 19.4. **PARA PIHAK** dapat mengadakan pengembangan secara bersama atas Kekayaan Intelektual dari semua pemikiran, gagasan dan penemuan dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul, khususnya yang spesifik berhubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**, tidak terbatas pada Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara sendiri atau secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 20

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

- 20.1 **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan sebagaimana diatur di dalam Lampiran E.
- 20.2 Dalam hal **PIHAK KEDUA** karena **KELALAIAN**nya tidak mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, **PIHAK KEDUA** harus menanggung segala akibat termasuk tuntutan material maupun non-material yang diajukan oleh **PIHAK KETIGA** maupun **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 21

HUKUM YANG MENGATUR

PERJANJIAN ini tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

PASAL 22

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 22.1 **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini melalui musyawarah atau secara damai.
- 22.2 **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang timbul sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, baik selama maupun setelah jangka waktu **PERJANJIAN** ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau secara damai oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | X |

PASAL 23

PELEPASAN DAN PENGESAMPINGAN

- 23.1 Tidak ada ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** yang dianggap dilepaskan oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali pelepasan tersebut dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 23.2 Penerimaan barang/peralatan terkait dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** atau hasil inspeksi tidak mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk selalu menyediakan, mengoperasikan atau menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan **PERJANJIAN**. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap adanya cacat tersembunyi atau kerusakan yang terjadi pada barang/peralatan yang dimaksud.
- 23.3 Persetujuan **PIHAK PERTAMA** terhadap desain diatur sebagai berikut:
- Apabila desain disusun oleh **PIHAK KEDUA**, maka persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas desain tidak melepaskan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas hasil pekerjaan yang mengacu pada desain **PIHAK KEDUA** dimaksud.
 - Apabila desain disusun oleh **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, maka persetujuan **PIHAK PERTAMA** atas desain tidak melepaskan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas hasil pekerjaan yang mengacu pada desain **PIHAK KETIGA** dimaksud.
 - Apabila desain disusun oleh **PIHAK KETIGA** yang ditunjuk dan/atau yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan dengan mengikuti seluruh isi desain dimaksud, sehingga:
 - Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan rencana sebagai akibat tidak dilaksanakannya desain **PIHAK KETIGA** oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** atas biayanya sendiri bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan; atau
 - Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang disebabkan oleh hasil desain/teknologi **PIHAK KETIGA** yang tidak berhasil, maka **PIHAK KEDUA** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil pekerjaan.

PASAL 24

SURAT MENYURAT DAN PEMBERITAHUAN

- 24.1 Surat menyurat dan/atau pemberitahuan terkait pelaksanaan **PERJANJIAN** dilakukan sebagaimana diatur pada Lampiran A.
- 24.2 Semua pemberitahuan pada **PERJANJIAN** ini wajib tertulis dan dapat diserahkan langsung atau melalui faksimili kepada Wakil **PARA PIHAK** yang sah yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, pada alamat yang tercantum sesuai Lampiran A, dan mulai berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tersebut.
- 24.3 Setiap surat menyurat dan korespondensi yang menyatakan keputusan dari **PIHAK PERTAMA** adalah bersifat final dan wajib diikuti oleh **PIHAK KEDUA**. Oleh karenanya, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk kembali mempermasalahkan keputusan yang telah diambil oleh **PIHAK PERTAMA** kecuali terdapat data teknis baru yang berpengaruh kepada keputusan **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** tidak diwajibkan untuk membela/menanggapi setiap surat/permintaan **PIHAK KEDUA** dengan pokok permasalahan yang sama.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| ✓ | ✓ | X |

PASAL 25
PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN

- 25.1 **PIHAK KEDUA** wajib memelihara catatan-catatan dan semua transaksi dengan benar sesuai dengan praktek akuntansi yang lazim, yang berhubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**, serta wajib menyimpan semua catatan tersebut selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah **PERJANJIAN** ini berakhir.
- 25.2 **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemeriksaan terhadap **PIHAK KEDUA** atas catatan-catatan dan semua transaksi maupun hal-hal lain terkait pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, selama masa berlaku **PERJANJIAN** dan masa penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.1 **PERJANJIAN**.
- 25.3 **PIHAK PERTAMA** dan SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) kepada **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan data *hardcopy* dan data *digital* kepada **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas. **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada **PIHAK KEDUA**. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *current* dan *post audit*.
- 25.4 Apabila **PIHAK KEDUA** menolak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.2 dan 25.3 **PERJANJIAN**, **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi antara lain administrasi dan finansial yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan SKK Migas.
- 25.5 Dalam rangka evaluasi kinerja **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **PERJANJIAN**, **PIHAK PERTAMA** secara periodik akan melakukan penilaian dengan menggunakan mekanisme indikator penilaian kinerja/Key Performance Indicator (KPI) sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam Lampiran A.1 **PERJANJIAN** ini.

PASAL 26
ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan pernah membayar sesuatu upah, komisi atau imbalan atau memberikan sesuatu hadiah, atau potongan dari jenis apapun, secara langsung dan/atau tidak langsung kepada seseorang petugas, pegawai, agen atau wakil **PIHAK PERTAMA**, baik sebagai suatu bujukan untuk memperoleh **PERJANJIAN** ini atau untuk sesuatu janji selama berlangsungnya **PERJANJIAN** ini atau sebagai suatu pengakuan dari suatu persetujuan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** untuk bertindak atau tidak bertindak.

PASAL 27
AMANDEMEN

- 27.1 Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam **PERJANJIAN** ini, setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk amandemen.
- 27.2 **PERJANJIAN** ini dapat diberlakukan di seluruh Wilayah Kerja **PIHAK PERTAMA**.

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------|-------|-------------|
| SCM | LEGAL | |
| A | B | C |

Dalam hal terjadi penambahan lokasi **PEKERJAAN** yang disepakati **PARA PIHAK** yang tidak merubah harga satuan **PEKERJAAN**, maka tidak perlu dilakukan amandemen pada **PERJANJIAN** ini.

Dalam hal terjadi penambahan lokasi **PEKERJAAN** yang disepakati **PARA PIHAK** yang merubah harga satuan **PEKERJAAN** maka perlu dilakukan amandemen pada **PERJANJIAN** ini.

- 27.3 **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan perubahan **PERJANJIAN** dalam hal adanya kebijakan dan/atau perubahan kebijakan dalam hal terjadi keadaan khusus (misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan oleh induk perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas dan/atau atau Instansi Pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan **PEKERJAAN**.
- 27.4 Apabila terjadi perubahan dalam kondisi pelaksanaan **PEKERJAAN** dan tidak ada perintah/permintaan/kesepakatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukannya perubahan lingkup kerja, **PIHAK KEDUA** tetap wajib untuk melaksanakan seluruh **PEKERJAAN** sesuai dengan **PERJANJIAN**. Namun demikian, ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai kontraktor profesional untuk menyampaikan pertimbangan, saran, atau kajian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 28

LAIN-LAIN

Judul-judul dari Pasal-Pasal pada **PERJANJIAN** ini dan daftar-daftar dan dokumen-dokumen lain yang terdapat pada **PERJANJIAN** ini hanya untuk mempermudah pengacuannya dan tidak dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk membatasi atau sebaliknya mempengaruhi pokok permasalahannya.

Demikianlah **PERJANJIAN** ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal **PERJANJIAN** ini.

PIHAK PERTAMA



A836DAFF160933525

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Agus Amperianto

Asset 4 General Manager

A handwritten signature in black ink.

PIHAK KEDUA



Nina Aryani
Direktur

| PIHAK PERTAMA | | PIHAK KEDUA |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SCM | LEGAL | |
| A handwritten signature in black ink. | A handwritten signature in black ink. | A handwritten signature in black ink. |